PUNGGAWA
SOCIAL INQUIRY

Punggawa Social Inquiry
Volume 1, Number 3, 2026
E-ISSN: 3164-015X
Open Access: punggawajournal.com/psi

Diplomasi Budaya Berbasis Santri: Mengintegrasikan Bhinneka Tunggal Ika dan *Tasamuh* dalam Menanggapi Disinformasi, Islamofobia, dan Dehumanisasi

Dian Rahmana Putri[1], Zaki Alghifari[2], Najwa Fadilla[3]
[1]UIN Alauddin Makassar, Indonesia
[2]Pondok Modern Darusallam Gontor, Ponorogo Indonesia
[3]PKP Al-Hidayah Jambi, Indonesia
Korespondensi: dianrahmanaputri17@gmail.com

Informasi Artikel

Riwayat artikel:
Received Sept 28th, 2026
Revised Nov 6th, 2026
Accepted Nov 14th, 2026

Keyword:
Cultural diplomacy; Santri diplomacy; Bhinneka Tunggal Ika; *Tasamuh*; Islamophobia.

ABSTRAK

Disinformation, Islamophobia and dehumanisation pose serious challenges to intercultural relations by reinforcing prejudices, shaping negative representations and undermining respect for human dignity. In this context, cultural diplomacy must move beyond the one-way promotion of national culture by encouraging community participation in building intercultural relations. This article examines the potential of cultural diplomacy based on santri and the community in addressing these challenges and develops a relevant conceptual framework. This study employs a conceptual literature review of academic publications on cultural diplomacy, public diplomacy, non-state actors, santri diplomacy, Bhinneka Tunggal Ika, *tasamuh*, digital communication, and intergroup relations. The literature was analysed thematically through the identification of concepts, categorisation of issues, and conceptual synthesis. The findings indicate that the participation of santri and the community can strengthen cultural diplomacy through direct interaction, intercultural dialogue, and responsible digital communication. The effectiveness of these approaches depends on equal participation, the quality of interaction, shared objectives, institutional support and sustained engagement. This article proposes the Bhinneka-*Tasamuh* Community-Based Cultural Diplomacy Framework, which integrates Bhinneka Tunggal Ika as a national foundation and *tasamuh* as an ethical basis for intercultural communication. This framework makes a conceptual contribution to the development of a more inclusive and participatory form of Indonesian cultural diplomacy, whilst also serving as a foundation for future empirical research.

© 2026 The Authors. Published by Punggawa Legacy Center. This is an open access article under the CC BY license (https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/)

PENDAHULUAN

Diplomasi budaya adalah pendekatan dalam hubungan internasional yang memanfaatkan pertukaran nilai, gagasan, tradisi, dan ekspresi budaya untuk menumbuhkan saling pengertian antarmasyarakat. Seiring berjalannya waktu, diplomasi budaya telah berkembang melampaui kegiatan pemerintah yang bertujuan untuk memperkenalkan identitas nasional kepada komunitas internasional. Keterlibatan aktor non-negara menjadi semakin signifikan, karena hubungan lintas budaya juga terjalin melalui interaksi sosial, pertukaran pengalaman, dan kerja sama antar-masyarakat. Ang et al., (2015) membedakan antara diplomasi budaya yang cenderung berorientasi pada kepentingan pemerintah dan hubungan budaya yang berkembang melalui keterlibatan aktor non-negara. Perbedaan ini menyoroti bahwa hubungan lintas budaya dibangun tidak hanya melalui perwakilan resmi negara, tetapi juga melalui komunikasi langsung dan pertemuan antar-masyarakat.

Urgensi pendekatan ini semakin terlihat jelas dalam dinamika komunikasi global, yang ditandai oleh meningkatnya mobilitas manusia dan konektivitas digital. Perkembangan ini membuka peluang bagi pertukaran informasi dan pemahaman antarbudaya, namun pada saat yang sama menghadirkan tantangan berupa disinformasi, prasangka agama, Islamofobia, serta narasi yang merendahkan kelompok-kelompok tertentu. Bhatia & Arora, (2024) menunjukkan bagaimana disinformasi anti-Muslim dibangun melalui strategi diskursif di media sosial. Masalah-masalah ini bukan sekadar soal ketidakakuratan fakta, tetapi juga berkaitan dengan pembentukan persepsi publik mengenai identitas agama dan kelompok sosial. Ketika suatu kelompok sebagian besar direpresentasikan melalui stereotip dan informasi yang menyesatkan, ruang untuk dialog dapat menyempit dan hubungan antarkelompok berisiko menjadi semakin terpolarisasi. Oleh karena itu, upaya untuk menumbuhkan pemahaman antarbudaya harus melampaui penyebaran informasi satu arah.

Diplomasi budaya berbasis komunitas menciptakan peluang untuk menjalin hubungan yang lebih partisipatif melalui pertemuan tatap muka, dialog, dan pertukaran pengalaman. Pendekatan ini memungkinkan individu tidak hanya menerima informasi tentang budaya lain, tetapi juga memahami nilai-nilai, pengalaman, dan perspektif komunitas yang berinteraksi dengan mereka. Pentingnya interaksi semacam itu didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Pettigrew & Tropp, (2006), yang meta-analisisnya terhadap 713 sampel independen dari 515 studi menunjukkan bahwa kontak antarkelompok umumnya dikaitkan dengan berkurangnya prasangka. Bruneau et al., (2021) juga menunjukkan adanya hubungan antara kualitas kontak antarkelompok dengan berkurangnya dehumanisasi serta persepsi bahwa kelompok sendiri diperlakukan secara tidak manusiawi. Kedua studi tersebut memberikan landasan untuk memahami bahwa kualitas interaksi merupakan aspek krusial dalam membangun hubungan lintas identitas. Oleh karena itu, diplomasi budaya berbasis komunitas harus berfokus tidak hanya pada frekuensi pertemuan, tetapi juga pada kesetaraan, kualitas komunikasi, dan keberlanjutan hubungan.

Dalam konteks Indonesia, santri dan komunitas pesantren memiliki potensi untuk berkontribusi pada diplomasi budaya melalui pendidikan, kegiatan sosial, pertukaran budaya, dan komunikasi antarmasyarakat. Santri tidak hanya menjadi bagian dari lembaga pendidikan keagamaan, tetapi juga dapat berperan sebagai agen sosial yang memperkenalkan praktik keagamaan dan kehidupan bermasyarakat Indonesia kepada masyarakat di luar batas negara. Sebuah studi oleh Xue Song & Virdika Rizky Utama, (2025) mengenai diplomasi santri dalam hubungan Indonesia–Tiongkok menyoroti keterlibatan santri dalam dinamika diplomatik yang melibatkan organisasi keagamaan dan hubungan antarmasyarakat. Maulana, (2024) juga membahas diplomasi multi-jalur yang dipraktikkan oleh santri dalam memperkenalkan identitas Islam Nusantara ke panggung global. Studi-studi ini menunjukkan bahwa diplomasi santri telah mendapatkan pijakan dalam praktik hubungan transnasional. Meskipun demikian, keterlibatan santri masih dapat dikembangkan lebih lanjut melalui pendekatan yang lebih luas yang memposisikan mereka, bersama dengan masyarakat luas, sebagai aktor dalam diplomasi budaya yang memfasilitasi interaksi langsung dengan komunitas transnasional.

Pengembangan diplomasi budaya yang berlandaskan santri dan masyarakat memerlukan landasan nilai-nilai yang mampu menghubungkan identitas nasional dengan etika komunikasi antarbudaya. Dalam hal ini,Bhinneka Tunggal Ika dan *tasamuh* relevan sebagai dua prinsip yang saling melengkapi. Bhinneka Tunggal Ika adalah motto nasional yang menegaskan persatuan dalam keberagaman identitas, etnis, bahasa, budaya, dan agama. Nilai ini menempatkan keberagaman sebagai bagian integral dari identitas Indonesia yang harus diakui, bukan diseragamkan. Apandie et al., (2022) menunjukkan hubungan antara nilai Bhinneka Tunggal Ika dan moderasi agama dalam memperkuat pluralisme di Indonesia. Sementara itu, *tasamuh* adalah prinsip etika Islam yang menekankan penghormatan terhadap perbedaan, keadilan, dan saling menghormati. Dalam komunikasi antarbudaya, prinsip ini tidak berarti meninggalkan keyakinan pribadi atau menyetujui semua pandangan pihak lain, melainkan mendorong kesediaan untuk terlibat dalam dialog dan menghormati hak-hak orang lain. Asyadily et al., (2026) membahas *tasamuh* dalam hubungan antaragama sebagai bagian dari etika Islam dan praktik komunikatif dalam masyarakat multireligius. Integrasi kedua prinsip ini memberikan landasan normatif bagi diplomasi budaya: Bhinneka Tunggal Ika menegaskan pengakuan terhadap keragaman, sementara *tasamuh* menyediakan kerangka etis untuk membangun hubungan dengan kelompok-kelompok yang berbeda.

Selain interaksi tatap muka, ranah digital juga telah menjadi bagian penting dari diplomasi budaya kontemporer. Media digital memungkinkan pertukaran budaya menjangkau komunitas yang

lebih luas, sekaligus menyediakan ruang untuk mengklarifikasi informasi yang keliru. Namun, keberhasilan komunikasi digital tetap bergantung pada kualitas interaksi dan tanggung jawab penggunanya. Pereira Da Costa et al., (2024), melalui meta-analisis terhadap 88 studi yang melibatkan 9.385 peserta, menemukan bahwa kontak antarkelompok secara digital memiliki hubungan yang signifikan meskipun relatif kecil dengan berkurangnya prasangka. Temuan ini menunjukkan bahwa komunikasi digital dapat melengkapi pertemuan tatap muka, bukan sepenuhnya menggantikannya. Dalam konteks diplomasi santri, ruang digital dapat dimanfaatkan untuk berbagi pengalaman budaya, mengklarifikasi informasi yang menyesatkan, dan membangun representasi Islam yang lebih holistik sambil menjunjung tinggi martabat manusia.

Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengkaji diplomasi budaya, aktor non-negara, diplomasi santri, pluralisme, *tasamuh*, dan interaksi antarkelompok dalam mengurangi prasangka. Namun, penelitian-penelitian ini belum sepenuhnya mengaitkan peran santri dan masyarakat dengan integrasi nilai-nilai Bhinneka Tunggal Ika dan *tasamuh* sebagai landasan diplomasi budaya berbasis masyarakat untuk melawan disinformasi, Islamofobia, dan dehumanisasi. Penelitian tentang diplomasi santri telah menyoroti keterlibatan santri dalam hubungan lintas negara, sementara penelitian tentang pluralisme dan *tasamuh* lebih menekankan pada penghormatan terhadap perbedaan dan hidup berdampingan antaragama. Oleh karena itu, masih ada ruang konseptual untuk menjelaskan bagaimana kedua nilai ini dapat diintegrasikan ke dalam mekanisme diplomasi budaya yang melibatkan interaksi langsung, dialog lintas budaya, dan komunikasi digital yang bertanggung jawab.

Mengingat kesenjangan ini, artikel ini bertujuan untuk menganalisis potensi diplomasi budaya yang diprakarsai oleh santri dan masyarakat sebagai pendekatan relasional dalam menumbuhkan pemahaman antarbudaya, serta mengembangkan kerangka konseptual yang mengintegrasikan Bhinneka Tunggal Ika dan *tasamuh*. Kerangka yang diusulkan ini dinamakan Kerangka Diplomasi Budaya Berbasis Masyarakat Bhinneka-*Tasamuh*. Kerangka kerja ini menempatkan Bhinneka Tunggal Ika dan *tasamuh* sebagai landasan normatifnya, santri dan masyarakat sebagai aktor, serta interaksi langsung, dialog antarbudaya, dan komunikasi digital yang bertanggung jawab sebagai mekanisme diplomatik. Artikel ini berpendapat bahwa keterlibatan masyarakat menawarkan keunggulan relasional dalam menumbuhkan kepercayaan, memfasilitasi pertukaran pengalaman, dan membangun hubungan timbal balik, berbeda dengan promosi budaya yang hanya mengandalkan penyampaian pesan satu arah. Keunggulan-keunggulan ini tidak berarti menggantikan peran pemerintah, melainkan menekankan pentingnya sinergi antara dukungan kelembagaan dan partisipasi masyarakat. Melalui kerangka konseptual ini, diharapkan diplomasi budaya dipahami tidak hanya sebagai sarana untuk memperkenalkan identitas nasional, tetapi juga sebagai pendekatan untuk memperkuat solidaritas lintas budaya dan penghormatan terhadap martabat manusia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan tinjauan pustaka konseptual untuk menganalisis diplomasi budaya yang berpusat pada santri dan masyarakat luas sebagai respons terhadap disinformasi, Islamofobia, dan dehumanisasi. Pendekatan ini dipilih karena penelitian ini berfokus pada pengembangan hubungan antarkonsep dan sintesis pemikiran teoretis, bukan pada pengumpulan data lapangan. Melalui pendekatan ini, penelitian ini mengkaji keterkaitan antara diplomasi budaya, peran aktor non-negara, nilai Bhinneka Tunggal Ika, prinsip *tasamu*, dan komunikasi digital dalam membangun hubungan antarbudaya.

Bahan penelitian diambil dari literatur akademis berupa artikel jurnal ilmiah, buku akademis, dan publikasi ilmiah lain yang relevan. Pemilihan literatur didasarkan pada relevansinya dengan lima bidang fokus, yaitu: (1) diplomasi budaya dan diplomasi publik; (2) peran aktor non-negara dalam hubungan internasional; (3) diplomasi santri dan hubungan antarmasyarakat; (4) Bhinneka Tunggal Ika dan *tasamuh* sebagai nilai-nilai dasar; serta (5) komunikasi digital, disinformasi, Islamofobia, dan dehumanisasi. Literatur tersebut dievaluasi berdasarkan relevansi isinya, kredibilitas penerbit, keterlacakan informasi bibliografi, serta kontribusinya dalam menjelaskan hubungan antara nilai-nilai dasar, aktor, dan mekanisme diplomasi budaya.

Analisis ini dilakukan dalam tiga tahap yang saling terkait. Pertama, literatur diidentifikasi dan dikategorikan berdasarkan tema-tema utama penelitian guna memetakan konsep dan temuan yang relevan. Kedua, analisis tematik dilakukan dengan membandingkan persamaan, perbedaan, keterkaitan, dan keterbatasan dari berbagai perspektif yang ditemukan dalam literatur. Tahap ini bertujuan untuk

memahami perkembangan diplomasi budaya dari pendekatan yang berpusat pada negara menuju keterlibatan aktor non-negara, kontribusi interaksi antarkelompok terhadap hubungan sosial, serta relevansi nilai-nilai nasional dan etika Islam dalam komunikasi lintas budaya. Ketiga, sintesis konseptual dilakukan dengan mengintegrasikan hasil analisis untuk merumuskan hubungan antara landasan normatif, aktor diplomatik, mekanisme komunikasi, dan tujuan yang ingin dicapai.

Hasil sintesis ini digunakan untuk mengembangkan Kerangka Kerja Diplomasi Budaya Berbasis Masyarakat Bhinneka-*Tasamuh*. Kerangka kerja ini mengintegrasikan Bhinneka Tunggal Ika dan *tasamuh* sebagai landasan normatifnya, santri dan masyarakat luas sebagai aktor diplomatik, serta interaksi langsung, dialog antarbudaya, dan komunikasi digital yang bertanggung jawab sebagai mekanisme pelaksanaannya. Pengembangan kerangka kerja ini bertujuan untuk menggambarkan potensi diplomasi budaya berbasis masyarakat dalam membangun kepercayaan, memperkuat pemahaman antarbudaya, melawan disinformasi dan Islamofobia, serta mempromosikan penghormatan terhadap martabat manusia.

Penelitian ini membedakan antara temuan empiris yang dilaporkan dalam literatur yang ada dan proposisi konseptual yang dikembangkan melalui sintesis yang dilakukan oleh penulis. Oleh karena itu, kerangka kerja yang dihasilkan merupakan model konseptual yang diusulkan dan belum melalui pengujian empiris. Pengujian dalam konteks interaksi antara santri dan komunitas lintas budaya diperlukan dalam penelitian selanjutnya untuk mengevaluasi keterlaksanaan, keefektifan, dan keterbatasan kerangka kerja ini.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Diplomasi Budaya dan Peran Aktor Non-Negara

Diplomasi budaya adalah proses membangun hubungan antarmasyarakat melalui pertukaran nilai-nilai budaya, pengetahuan, dan pengalaman. Seiring perkembangannya, praktik diplomasi tidak lagi sepenuhnya bergantung pada hubungan antar pemerintah yang formal, melainkan juga melibatkan organisasi masyarakat sipil, lembaga pendidikan, komunitas budaya, organisasi keagamaan, dan individu. Ang et al., (2015) membedakan antara diplomasi budaya yang berorientasi pada kepentingan pemerintah dan hubungan budaya yang berkembang melalui keterlibatan aktor non-negara. Perbedaan ini menunjukkan bahwa hubungan antarbudaya dapat terbentuk melalui interaksi sosial yang terjadi di luar mekanisme diplomatik formal. Dengan demikian, masyarakat bukan hanya sekadar sasaran keterlibatan budaya, tetapi juga dapat berperan dalam membangun hubungan lintas negara.

Perluasan aktor ini sejalan dengan perkembangan diplomasi publik, yang semakin menekankan keterlibatan dan partisipasi publik. Cull, (2008) mengidentifikasi lima komponen diplomasi publik: mendengarkan, advokasi, diplomasi budaya, pertukaran, dan penyiaran internasional. Komponen-komponen ini menunjukkan bahwa diplomasi tidak dapat dilakukan hanya dengan menyampaikan pesan kepada audiens asing. Kemampuan untuk memahami perspektif orang lain, menciptakan peluang pertukaran, dan membangun hubungan merupakan bagian penting dari proses diplomatik. Geun Lee & Kadir Ayhan, (2015) juga menekankan pendekatan relasional, berbasis jaringan, dan kolaboratif dalam diplomasi publik. Dari perspektif ini, aktor non-negara memiliki kesempatan untuk membangun hubungan secara langsung melalui jejaring sosial dan kegiatan komunitas, sekaligus menjalin kerja sama dengan pemerintah tanpa harus selalu menunggu inisiatif kelembagaan negara.

Keterlibatan publik dalam diplomasi dapat dipahami melalui tingkatan komunikasi yang terjalin di antara para pihak. Cowan & Arsenault, (2008) menggambarkan tiga tingkatan keterlibatan dalam diplomasi publik: monolog, dialog, dan kolaborasi. Monolog berfokus pada penyampaian informasi; dialog membuka peluang untuk pertukaran perspektif; sedangkan kolaborasi memungkinkan para pihak untuk terlibat dalam kegiatan bersama. Ketiga bentuk ini menunjukkan bahwa hubungan lintas budaya dapat berkembang dari pengakuan identitas menuju keterlibatan yang lebih mendalam. Dalam konteks ini, promosi budaya tetap memiliki tujuan, tetapi tidak cukup untuk membangun hubungan timbal balik kecuali jika disertai dengan peluang bagi masyarakat untuk berinteraksi dan berkolaborasi. Oleh karena itu, kualitas diplomasi budaya harus dinilai berdasarkan proses komunikasi dan hubungan yang terbentuk, bukan semata-mata berdasarkan luasnya penyebaran informasi.

Relevansi keterlibatan aktor non-negara dalam konteks Indonesia terlihat jelas dalam studi yang dilakukan oleh Trisni et al., (2025) mengenai diplomasi publik relasional melalui pusat-pusat seni Indonesia dalam rangka Program Beasiswa Seni dan Budaya Indonesia. Studi ini melibatkan pengelola pusat seni, instruktur, peserta program, serta narasumber dari Kementerian Luar Negeri. Hasil penelitian

menunjukkan bahwa pusat-pusat seni berkontribusi terhadap diplomasi publik melalui pengalaman budaya dan interaksi langsung yang terjadi selama program berlangsung. Hubungan yang terjalin bahkan mempererat ikatan emosional antara peserta dan masyarakat tempat mereka belajar. Temuan ini menunjukkan bahwa kontribusi aktor non-negara tidak selalu bergantung pada mekanisme diplomatik formal, tetapi dapat berkembang melalui pengalaman sosial yang otentik. Dengan demikian, masyarakat memainkan peran penting dalam membangun hubungan budaya karena mereka tidak hanya menyampaikan representasi suatu masyarakat, tetapi juga memberikan pengalaman langsung yang memungkinkan orang lain memahami kehidupan masyarakat tersebut.

Meskipun demikian, keterlibatan aktor non-negara tidak secara otomatis menghasilkan diplomasi yang lebih efektif dibandingkan pendekatan yang dipimpin pemerintah. Keberhasilannya tetap dipengaruhi oleh kredibilitas para aktor, kesetaraan partisipasi, kualitas komunikasi, keberlanjutan hubungan, dan dukungan kelembagaan. Kegiatan yang sekadar bersifat seremonial atau gagal memberikan kesempatan partisipasi yang setara berisiko menghasilkan hubungan yang dangkal. Selain itu, aktor masyarakat sipil perlu menghindari representasi budaya yang menyederhanakan identitas suatu bangsa atau kelompok secara berlebihan. Hal ini penting karena setiap komunitas memiliki latar belakang, pengalaman, dan ekspresi budaya yang beragam. Oleh karena itu, kekuatan pendekatan berbasis komunitas lebih terletak pada kemampuannya untuk membina hubungan antarpribadi, memfasilitasi pertukaran pengalaman, dan membangun kepercayaan, daripada pada asumsi bahwa semua kegiatan komunitas secara inheren lebih berhasil daripada diplomasi pemerintah.

Berdasarkan pembahasan ini, diplomasi budaya dapat dipahami sebagai proses yang memungkinkan negara dan masyarakat sipil memainkan peran yang saling melengkapi. Pemerintah berperan dalam menyediakan kebijakan, akses, fasilitas, dan dukungan kelembagaan, sementara aktor non-negara menyumbangkan jaringan sosial, pengalaman komunitas, dan interaksi langsung dengan masyarakat. Hubungan antara keduanya dapat memperkuat pelaksanaan bentuk diplomasi yang lebih partisipatif dan berkelanjutan. Dalam kerangka penelitian ini, perspektif ini menjadi landasan untuk memposisikan santri dan masyarakat sebagai aktor potensial dalam diplomasi budaya. Keterlibatan mereka tidak hanya bertujuan untuk memperkenalkan identitas Indonesia, tetapi juga untuk memfasilitasi dialog, membangun kepercayaan, dan mengembangkan pemahaman antarbudaya melalui pengalaman sosial dalam kehidupan nyata.

Diplomasi Santri dalam Hubungan Antarbudaya

Santri adalah aktor sosial yang memiliki potensi untuk berkontribusi pada diplomasi budaya melalui pendidikan, pertukaran pengetahuan, kegiatan sosial, dan komunikasi antarbudaya. Potensi ini terkait dengan evolusi diplomasi, yang semakin membuka peluang bagi keterlibatan aktor non-negara dalam hubungan antarmasyarakat. Dalam konteks ini, santri tidak hanya berinteraksi di lingkungan pendidikan keagamaan, tetapi juga dapat membangun hubungan dengan individu dan komunitas dari latar belakang budaya dan agama yang berbeda. Pengalaman pendidikan, mobilitas internasional, dan keterlibatan sosial mereka memungkinkan santri untuk memperkenalkan kehidupan keagamaan dan budaya Indonesia sekaligus memperoleh pemahaman langsung tentang komunitas yang mereka temui.

Maulana (2024) menjelaskan peluang bagi para santri untuk terlibat dalam diplomasi multi-jalur, khususnya melalui advokasi perdamaian dan penyebaran nilai-nilai Islam Nusantara. Keterlibatan tersebut mencakup dialog antaragama, program pertukaran santri, serta pemanfaatan media sebagai sarana komunikasi dan dakwah. Temuan ini menunjukkan bahwa kegiatan para santri dapat melampaui lingkungan pesantren dan berkontribusi pada hubungan antarmasyarakat. Dari perspektif diplomasi budaya, peran santri sangat signifikan karena mereka dapat berfungsi sebagai jembatan sosial dan keagamaan tanpa harus bertindak sebagai perwakilan resmi pemerintah. Peran ini memungkinkan hubungan antarbudaya berkembang melalui pengalaman dan komunikasi langsung.

Praktik diplomasi santri juga terlihat dalam pengalaman santri Indonesia yang menempuh studi di Tiongkok. Dewi et al., (2023) meneliti keterlibatan santri, alumni universitas di Tiongkok, dan organisasi mahasiswa Islam Indonesia dalam membangun ikatan budaya antara Indonesia dan Tiongkok. Interaksi dengan lingkungan sosial setempat, paparan terhadap kehidupan masyarakat, serta pertukaran perspektif memberikan peluang bagi santri dan mahasiswa untuk mengembangkan pemahaman lintas budaya. Pengalaman-pengalaman ini menunjukkan bahwa diplomasi budaya tidak selalu terjadi melalui program resmi, tetapi juga dapat berkembang melalui hubungan antarpribadi yang kemudian dibagikan kepada masyarakat luas.

Sebuah studi oleh Xue Song & Virdika Rizky Utama (2025) memperluas pembahasan ini dengan menyoroti keterlibatan organisasi keagamaan, mahasiswa, akademisi, dan diaspora dalam hubungan Indonesia–Tiongkok. Kegiatan budaya, kolaborasi akademis, pertukaran antarmasyarakat, dan pemanfaatan media digital berfungsi sebagai sarana untuk memperkenalkan Indonesia sekaligus menumbuhkan pemahaman terhadap masyarakat lain. Studi tersebut juga menyoroti praktik advokasi balik yaitu, menyajikan perspektif yang lebih seimbang mengenai penggambaran kehidupan keagamaan di Tiongkok dalam media Indonesia, yang sering kali dianggap terlalu disederhanakan atau negatif. Hal ini menunjukkan bahwa diplomasi santri tidak hanya menjangkau dari Indonesia ke komunitas internasional, tetapi juga dapat membantu masyarakat Indonesia memahami realitas sosial dan budaya negara-negara lain secara lebih seimbang.

Dari ketiga studi ini, diplomasi santri dapat dipahami melalui tiga karakteristik yang saling terkait. Pertama, dimensi interpersonal, yang mengacu pada hubungan yang dibangun melalui pertemuan dan pengalaman dalam kehidupan sehari-hari. Kedua, dimensi representasional, yang mengacu pada kemampuan untuk menampilkan identitas dan pengalaman sosial-keagamaan Indonesia tanpa menyederhanakan keragaman masyarakatnya secara berlebihan. Ketiga, dimensi komunikatif, yang melibatkan penggunaan dialog dan media digital untuk memperluas pertukaran pengetahuan serta mengoreksi representasi yang tidak seimbang. Ketiga dimensi ini menunjukkan bahwa diplomasi santri tidak berhenti pada tindakan memperkenalkan identitas, tetapi juga mencakup proses mendengarkan, memahami, dan membangun hubungan timbal balik.

Namun, diplomasi santri tidak boleh diarahkan pada homogenisasi identitas Islam atau budaya Indonesia. Para santri berasal dari latar belakang sosial, wilayah, tradisi, dan pendidikan yang beragam. Keragaman ini, pada kenyataannya, merupakan sumber kekuatan dalam diplomasi budaya karena memungkinkan komunitas internasional mengenal Indonesia melalui berbagai pengalaman dan ekspresi sosial. Oleh karena itu, para santri tidak boleh diposisikan sebagai satu-satunya perwakilan seluruh rakyat Indonesia. Mereka adalah bagian dari masyarakat pluralistik yang dapat secara terbuka menampilkan identitas keagamaan dan kebangsaan mereka sekaligus mengakui keberadaan identitas-identitas lainnya.

Agar peran ini dapat dijalankan secara bermakna, diplomasi santri memerlukan keterampilan komunikasi lintas budaya. Kemampuan untuk mendengarkan, memahami konteks sosial, menyampaikan gagasan secara akurat, dan merespons perbedaan tanpa prasangka merupakan unsur-unsur penting dalam membangun hubungan. Selain itu, penguasaan bahasa asing, literasi digital, pengetahuan tentang budaya lain, serta keterampilan berdialog perlu diperkuat melalui dukungan dari pesantren, lembaga pendidikan, organisasi keagamaan, masyarakat, dan pemerintah. Dukungan kelembagaan semacam itu berfungsi untuk memperluas akses ke pertukaran dan jaringan internasional, bukan untuk membatasi otonomi santri sebagai aktor sosial.

Berdasarkan uraian tersebut, diplomasi santri dalam penelitian ini diposisikan sebagai bagian dari diplomasi budaya berbasis masyarakat. Perannya mencakup pemupukan identitas, pertukaran pengalaman, dialog antarbudaya, serta komunikasi yang menumbuhkan hubungan saling menghormati. Posisi ini berfungsi sebagai landasan untuk mengintegrasikan peran santri dengan Bhinneka Tunggal Ika prinsip persatuan dalam keberagaman dan *tasamuh* toleransi sebagai landasan etis dalam berinteraksi dengan kelompok-kelompok yang berbeda. Dengan demikian, diplomasi santri tidak hanya berorientasi pada representasi identitas, tetapi juga pada pembentukan hubungan antarbudaya yang inklusif dan bermartabat.

Bhinneka Tunggal Ika dan *Tasamuh* sebagai Landasan Etis Diplomasi Budaya

Diplomasi budaya berbasis komunitas tidak dapat hanya bergantung pada kehadiran para pelaku dan mekanisme komunikasi. Hubungan antarbudaya juga memerlukan landasan nilai-nilai yang memandu cara masing-masing pihak memahami, memperlakukan, dan menghormati perbedaan. Dalam masyarakat dengan identitas yang beragam, kemampuan untuk memperkenalkan budaya sendiri harus disertai dengan kesediaan untuk mengakui keberadaan kelompok lain dan membangun hubungan tanpa memaksakan satu identitas sebagai standar bagi yang lain. Dalam konteks Indonesia, Bhinneka Tunggal Ika dan *tasamuh* dapat diintegrasikan sebagai dua landasan yang saling melengkapi. Meskipun memiliki konteks konseptual yang berbeda, keduanya bersatu dalam orientasinya untuk mengakui keragaman, menghormati orang lain, dan memupuk kehidupan bersama yang bermartabat.

Bhinneka Tunggal Ika tidak hanya berfungsi sebagai moto persatuan, tetapi juga mencerminkan prinsip nasional yang menempatkan keberagaman sebagai bagian tak terpisahkan dari identitas Indonesia. Persatuan dalam prinsip ini tidak dibangun melalui homogenisasi identitas, melainkan melalui pengakuan atas perbedaan sebagai realitas sosial. Jegalus (2026) mengkaji Bhinneka Tunggal Ika sebagai ontologi sosial Indonesia, yang memposisikan hubungan antara persatuan dan keberagaman sebagai isu mendasar dalam kehidupan sosial. Perspektif ini menekankan bahwa persatuan dan keberagaman tidak saling bertentangan. Keduanya dapat hidup berdampingan dalam membentuk kehidupan bangsa. Oleh karena itu, Bhinneka Tunggal Ika harus dipahami sebagai prinsip yang memungkinkan perbedaan diakui dalam kerangka identitas nasional yang bersama.

Pemahaman ini memiliki implikasi terhadap cara Indonesia direpresentasikan dalam diplomasi budaya. Indonesia tidak dapat digambarkan semata-mata berdasarkan satu identitas etnis, bahasa, tradisi, atau ekspresi keagamaan saja, karena karakter masyarakatnya dibentuk oleh beragam komunitas dengan pengalaman sejarah dan praktik sosial yang berbeda-beda. Representasi yang hanya menonjolkan satu kelompok berisiko menghasilkan gambaran yang tidak utuh mengenai kehidupan bangsa ini. Apandie et al., (2022) menunjukkan hubungan antara nilai Bhinneka Tunggal Ika dan moderasi beragama dalam memperkuat pluralisme di Indonesia. Nilai-nilai kebersamaan, keadilan, rasa hormat, kerukunan, dan empati merupakan unsur-unsur kunci dalam membangun masyarakat yang menghargai keberagaman. Dalam diplomasi budaya, prinsip ini dapat diterapkan melalui representasi yang inklusif, penyediaan ruang bagi ekspresi budaya yang beragam, serta kerja sama yang tidak mengharuskan pihak lain untuk melepaskan identitasnya.

Sementara itu, *tasamuh* adalah prinsip etika Islam yang berkaitan dengan toleransi, rasa hormat, dan kesediaan untuk membangun kehidupan bersama di tengah perbedaan. Dalam komunikasi antarbudaya, *tasamuh* tidak dapat dipahami sekadar sebagai penerimaan pasif terhadap keberadaan kelompok lain. Prinsip ini harus diwujudkan melalui tindakan yang menghormati martabat, hak, dan perspektif orang lain. Rasa hormat semacam itu juga tidak mengharuskan seseorang untuk meninggalkan keyakinannya atau setuju dengan semua pandangan yang berbeda dari pandangannya sendiri. Sebaliknya, *tasamuh* memberikan panduan agar perbedaan tidak dijadikan alasan untuk merendahkan, mendiskriminasi, atau menutup komunikasi. Dengan demikian, komitmen terhadap keyakinan pribadi seseorang dapat berdampingan dengan penghormatan terhadap hak dan martabat orang lain.

Asyadily et al., (2026) memandang *tasamuh* dalam masyarakat multireligius sebagai kerangka etika Islam yang diwujudkan melalui praktik-praktik komunikatif. Penelitian ini mengidentifikasi lima praktik yang saling terkait: komunikasi dialogis yang menumbuhkan *ta'āruf* (saling mengenal dan memahami), musyawarah yang mendukung hidup berdampingan *(ta'āyush)*, kesepakatan sosial yang mengarah pada kerja sama *(ta'āwun)*, komunikasi yang bebas dari dominasi sebagai perwujudan keadilan *('adl)*, dan ruang publik yang menumbuhkan belas kasih dan kepedulian *(raḥmah)*. Kerangka kerja ini menunjukkan bahwa *tasamuh* bukan sekadar sikap normatif, melainkan dapat diwujudkan dalam tindakan komunikatif yang konkret. Dalam diplomasi budaya, praktik-praktik ini memberikan arahan bagi para santri dan masyarakat luas untuk membangun dialog, kerja sama, kesetaraan, serta kepedulian terhadap kebaikan bersama.

Meskipun memiliki orientasi yang serupa, Bhinneka Tunggal Ik dan *tasamuh* tidak dapat dianggap sebagai konsep yang identik. Bhinneka Tunggal Ika berakar pada identitas nasional Indonesia dan memberikan kerangka acuan mengenai bagaimana keberagaman diintegrasikan ke dalam persatuan nasional. Sebaliknya, *tasamuh* berasal dari etika Islam dan menawarkan panduan moral mengenai bagaimana individu seharusnya berinteraksi dengan mereka yang berbeda. Perbedaan mendasar inilah yang justru menjadi alasan utama untuk mengintegrasikan keduanya tanpa menghilangkan karakteristik masing-masing. Bhinneka Tunggal Ika memberikan orientasi nasional yang mengakui keberagaman, sedangkan *tasamuh* menyalurkan pengakuan tersebut ke dalam perilaku dan komunikasi yang menghormati orang lain. Hubungan antara keduanya bersifat saling melengkapi: pengakuan terhadap keberagaman harus disertai dengan praktik-praktik sosial yang menjamin penghormatan terhadap perbedaan.

Integrasi kedua nilai ini memiliki implikasi praktis bagi diplomasi budaya yang berakar pada komunitas santri dan masyarakat lokal. Bhinneka Tunggal Ika mendorong para santri untuk menampilkan Indonesia sebagai bangsa yang ditandai oleh identitas dan tradisi yang beragam, bukan sebagai masyarakat dengan ekspresi budaya tunggal dan seragam. Sementara itu, *tasamuh* berfungsi

sebagai prinsip panduan dalam berinteraksi dengan komunitas lain melalui komunikasi yang terbuka, adil, dan tidak diskriminatif. Integrasi ini juga menekan kecenderungan diplomasi budaya untuk menjadi sarana menegaskan keunggulan kelompok sendiri. Penyajian identitas keagamaan dan kebangsaan seharusnya menciptakan ruang untuk saling pengertian dan saling menghormati, bukan untuk membangun hierarki di antara budaya atau keyakinan. Dengan demikian, identitas dapat disajikan secara tegas tanpa menafikan keberadaan dan martabat pihak lain.

Relevansi kedua nilai ini menjadi semakin krusial ketika diplomasi budaya berhadapan dengan disinformasi, Islamofobia, dan dehumanisasi. Ketiga hal tersebut terkait erat dengan pembentukan persepsi dan perlakuan terhadap kelompok-kelompok sosial. Disinformasi dapat memicu kesalahpahaman; Islamofobia memperkuat prasangka terhadap umat Islam; dan dehumanisasi mereduksi pengakuan atas martabat kelompok-kelompok yang menjadi sasaran. Dalam konteks ini, Bhinneka Tunggal Ika menjadi landasan untuk menolak diskriminasi dan homogenisasi identitas, sementara *tasamuh* memandu respons kita melalui klarifikasi yang bertanggung jawab, dialog, dan penghormatan terhadap martabat manusia. Penggunaan komunikasi digital sebagai sarana koreksi juga harus menghindari pelestarian kebencian atau tindakan yang merendahkan kelompok lain. Narasi tandingan perlu dibangun melalui informasi dan komunikasi yang akuntabel, yang tidak merampas kemanusiaan pihak yang dikritik.

Berdasarkan pembahasan ini, Bhinneka Tunggal Ika dan *tasamuh* diposisikan sebagai landasan normatif yang saling melengkapi dalam diplomasi budaya berbasis masyarakat. Bhinneka Tunggal Ika memberikan orientasi nasional bahwa keberagaman merupakan bagian dari identitas bersama, sementara *tasamuh* menawarkan pedoman etis untuk menunjukkan rasa hormat terhadap perbedaan dalam komunikasi. Integrasi kedua prinsip ini menjadi landasan bagi pengembangan Kerangka Kerja Diplomasi Budaya Berbasis Komunitas Bhinneka-*Tasamuh*. Dalam kerangka kerja ini, nilai-nilai nasional dan etika Islam tidak sekadar menjadi simbol identitas; keduanya diterjemahkan ke dalam interaksi langsung, dialog lintas budaya, kerja sama sosial, dan komunikasi digital yang bertanggung jawab. Melalui penerapan prinsip-prinsip ini, diplomasi budaya bertujuan untuk membangun kepercayaan di antara komunitas, mengurangi prasangka, dan memperkuat solidaritas yang menghormati martabat manusia.

Diplomasi Budaya dalam Menghadapi Disinformasi, Islamofobia, dan Dehumanisasi

Perkembangan komunikasi global telah mengubah cara masyarakat memperoleh informasi, memahami identitas, dan membentuk persepsi terhadap kelompok lain. Media digital memungkinkan informasi mengenai agama, budaya, dan cara hidup suatu bangsa menyebar melampaui batas-batas geografis dalam waktu singkat. Situasi ini membuka peluang bagi pertukaran pengetahuan dan komunikasi antarbudaya, namun pada saat yang sama menghadirkan tantangan berupa disinformasi, ujaran kebencian, Islamofobia, dan dehumanisasi. Isu-isu ini tidak hanya berkaitan dengan keakuratan informasi, tetapi juga bagaimana suatu kelompok direpresentasikan, dinilai, dan diperlakukan dalam kehidupan sosial. Oleh karena itu, diplomasi budaya harus dipahami tidak hanya sebagai sarana untuk mempromosikan identitas nasional, tetapi juga sebagai ruang komunikasi yang bertujuan untuk menumbuhkan pemahaman antarbudaya dan menantang narasi-narasi yang memperkuat prasangka.

Disinformasi telah menjadi masalah besar dalam lingkungan komunikasi saat ini. Informasi yang dimanipulasi atau disajikan secara menyesatkan dapat membentuk persepsi publik yang tidak sesuai dengan kenyataan. Ketika disinformasi menargetkan identitas keagamaan, dampaknya dapat melampaui kesalahpahaman individu, karena berpotensi menumbuhkan kecurigaan dan prasangka terhadap suatu kelompok secara keseluruhan. Bhatia & Arora (2024) menunjukkan bagaimana disinformasi anti-Muslim di Twitter dibangun dan disebarkan melalui strategi diskursif yang memanfaatkan solidaritas dalam kebencian, instrumen legitimasi, dan praktik pengawasan digital yang menargetkan kelompok Muslim. Studi ini menganalisis 7.000 postingan selama gelombang pertama pandemi COVID-19 di India yang menuduh umat Muslim menyebarkan virus sebagai bagian dari kampanye jihad. Temuan ini mengungkapkan bahwa disinformasi dapat dibangun melalui narasi yang mengaitkan identitas keagamaan dengan ancaman sosial. Dengan demikian, disinformasi bukan sekadar masalah ketidakakuratan fakta, tetapi juga dapat berfungsi sebagai mekanisme untuk mereproduksi prasangka antarkelompok. Sebuah studi eksperimental oleh Lewandowsky & Yesilada, (2021) menunjukkan bahwa memberikan pemahaman mengenai pola-pola argumentasi yang menyesatkan dapat meningkatkan ketahanan individu terhadap disinformasi baik yang bersifat Islamofobia maupun

Islamis radikal. Temuan ini menunjukkan bahwa upaya menangani disinformasi tidak cukup hanya dilakukan melalui klarifikasi setelah informasi palsu tersebar; hal ini juga memerlukan penguatan kemampuan masyarakat untuk mengenali teknik-teknik manipulasi informasi sejak awal.

Salah satu konsekuensi dari penyebaran narasi anti-Muslim adalah meningkatnya Islamofobia. Dalam konteks pembahasan ini, Islamofobia dipahami sebagai prasangka, ketakutan, permusuhan, atau perlakuan diskriminatif terhadap Islam dan umat Muslim, yang didasarkan pada generalisasi negatif mengenai identitas keagamaan. Fenomena ini tidak selalu terwujud dalam bentuk diskriminasi langsung. Islamofobia juga dapat berkembang melalui bahasa, simbol, pemberitaan, dan representasi media yang menggambarkan umat Islam sebagai kelompok yang homogen dan mengancam. Representasi semacam itu mengabaikan keragaman pengalaman, pemikiran, dan praktik keagamaan di kalangan umat Islam. Ketika stereotip terus-menerus direproduksi tanpa ruang untuk klarifikasi atau interaksi, identitas Muslim berisiko dipahami melalui gambaran yang tidak lengkap. Oleh karena itu, Islamofobia harus dipandang tidak hanya sebagai masalah hubungan antaragama, tetapi juga sebagai masalah komunikasi, representasi, dan pengakuan atas kesetaraan manusia.

Prasangka yang terus-menerus diperkuat melalui penggambaran negatif juga dapat dikaitkan dengan proses dehumanisasi. Haslam, (2006) mendefinisikan dehumanisasi sebagai proses di mana individu atau kelompok tidak lagi dipandang memiliki karakteristik yang melekat pada kemanusiaan. Proses ini dapat terjadi melalui penggambaran kelompok lain seolah-olah mereka tidak memiliki sifat-sifat kemanusiaan atau melalui perlakuan terhadap mereka sebagai objek yang tidak memiliki perasaan, pengalaman, dan martabat. Dalam konteks Islamofobia, dehumanisasi dapat muncul ketika umat Islam secara seragam digambarkan sebagai ancaman, alih-alih sebagai individu dan komunitas dengan kehidupan sosial yang beragam. Dengan demikian, dehumanisasi tidak hanya terkait dengan penggunaan bahasa yang merendahkan, tetapi juga dengan terkikisnya pengakuan atas kemanusiaan pihak lain. Hubungan antara disinformasi, Islamofobia, dan dehumanisasi dalam pembahasan ini menunjukkan bahwa masalah informasi dapat meningkat menjadi masalah hubungan sosial ketika narasi palsu terus membentuk cara suatu kelompok dipahami dan diperlakukan.

Dalam menangani isu-isu ini, interaksi antarkelompok berperan sebagai mekanisme yang relevan bagi diplomasi budaya. Bruneau et al., (2021), melalui studi terhadap 16 sampel di lima negara yang melibatkan sekitar 7.700 peserta, menemukan bahwa kualitas kontak antarkelompok berkaitan dengan berkurangnya dehumanisasi. Studi tersebut juga menunjukkan bahwa kualitas kontak dengan umat Muslim dapat memprediksi tingkat dehumanisasi terhadap kelompok Muslim pada pengukuran selanjutnya. Selain itu, kontak virtual yang berkelanjutan antara mahasiswa Amerika dan mahasiswa Muslim dikaitkan dengan penurunan dehumanisasi. Temuan-temuan ini memberikan landasan untuk memahami bahwa pertemuan yang bermakna baik secara langsung maupun melalui media digital dapat menciptakan peluang bagi individu untuk mengenal kelompok lain melalui pengalaman dan komunikasi bersama, bukan semata-mata melalui stereotip.

Namun, kontak antarkelompok tidak selalu mengarah pada pemahaman yang lebih baik. Kualitas hubungan, kesetaraan komunikatif, pengalaman para pihak, dan kondisi sosial yang mendasari pertemuan tersebut semuanya memengaruhi hasil interaksi. Pettigrew & Tropp, (2006), melalui meta-analisis terhadap 713 sampel independen dari 515 studi, menunjukkan bahwa kontak antarkelompok umumnya dikaitkan dengan berkurangnya prasangka. Namun, Paolini et al., (2024), melalui meta-analisis terhadap 238 sampel independen yang melibatkan 152.985 peserta, menemukan bahwa dampak negatif dari kontak antarkelompok dapat lebih kuat daripada manfaat dari kontak positif. Temuan ini menjadi pengingat bahwa sekadar mempertemukan dua kelompok saja tidak cukup untuk membangun hubungan yang konstruktif. Interaksi yang terjadi dalam situasi yang tidak setara, tegang, atau tanpa ruang untuk dialog justru dapat memperkuat prasangka yang sudah ada. Oleh karena itu, diplomasi budaya berbasis komunitas harus dirancang melalui interaksi yang menjamin partisipasi yang setara, tujuan bersama, keterbukaan, dan keberlanjutan hubungan. Relevansi pendekatan ini juga terlihat dalam penelitian oleh Pertiwi et al., (2020), yang mengkaji dua konteks budaya, termasuk hubungan antara komunitas Jawa dan Tionghoa Indonesia. Temuan penelitian menunjukkan bahwa kontak langsung, kontak tidak langsung, dan kontak daring berkaitan dengan penilaian terhadap kelompok lain, meskipun tingkat pengaruhnya dipengaruhi oleh status kelompok dan konteks sosial-politik. Temuan ini memperkuat pentingnya mempertimbangkan kondisi sosial lokal saat merancang interaksi lintas budaya.

Dalam konteks ini, diplomasi budaya memiliki tujuan yang melampaui sekadar mempromosikan identitas nasional. Melalui pertukaran pendidikan, dialog antaragama, kegiatan sosial, dan kerja sama komunitas, masyarakat dapat mengenal kelompok lain melalui pengalaman yang lebih nyata. Pengalaman bersama ini dapat menjadi sumber pemahaman alternatif terhadap representasi yang dibentuk oleh disinformasi atau narasi yang menyederhanakan identitas kelompok secara berlebihan. Oleh karena itu, nilai diplomasi budaya tidak hanya terletak pada pesan yang disampaikan, tetapi juga pada kualitas hubungan sosial yang terbentuk selama proses pertukaran tersebut. Ketika individu diberi kesempatan untuk berinteraksi sebagai sesama yang setara, mereka dapat menilai kelompok lain berdasarkan pengalaman dan komunikasi, bukan semata-mata berdasarkan informasi sepihak.

Selain interaksi tatap muka, komunikasi digital dapat memperluas cakupan hubungan antarbudaya. Pereira Da Costa et al., (2024), melalui meta-analisis terhadap 88 sampel independen yang melibatkan 9.385 peserta, menemukan bahwa kontak antarkelompok secara digital memiliki efek yang kecil namun signifikan dalam mengurangi prasangka. Mereka juga menunjukkan bahwa kontak digital langsung memiliki efek yang lebih besar daripada bentuk kontak digital tidak langsung. Temuan ini memberikan dasar untuk memposisikan media digital sebagai sarana yang mendukung hubungan lintas budaya, terutama ketika pertemuan fisik tidak selalu memungkinkan. Dalam diplomasi budaya yang berpusat pada santri dan masyarakat luas, media digital dapat digunakan untuk memperkenalkan kehidupan di pesantren, berbagi pengalaman pertukaran budaya, menjelaskan keragaman praktik keagamaan, serta menyajikan informasi yang lebih seimbang mengenai kehidupan komunitas Muslim di Indonesia. Dengan demikian, komunikasi digital tidak hanya berfungsi sebagai saluran promosi, tetapi juga sebagai ruang untuk membangun pemahaman melalui pertukaran informasi dan pengalaman.

Imperato et al., (2024), melalui sebuah penelitian yang melibatkan 267 peserta, menemukan bahwa persepsi mengenai kehadiran sosial dan kedekatan selama interaksi daring berkaitan dengan sikap yang lebih positif terhadap anggota kelompok lain. Temuan ini menunjukkan bahwa kualitas pengalaman komunikasi bukan sekadar keberadaan media digital perlu diperhitungkan saat membangun hubungan lintas budaya secara daring. Selain kontak daring langsung, interaksi yang diamati melalui komentar pengguna juga dapat secara tidak langsung membentuk pengalaman kontak antarkelompok. Jia et al., (2026), melalui eksperimen daring yang melibatkan 700 peserta, menemukan bahwa pengaruh komentar positif terhadap niat untuk berinteraksi dengan kelompok lain bervariasi tergantung pada pengalaman kontak langsung sebelumnya. Temuan ini menjadi pengingat bahwa komunikasi digital perlu mempertimbangkan pengalaman dan konteks audiens, bukan sekadar isi pesan yang disampaikan.

Meskipun demikian, penggunaan media digital sebagai alat diplomasi menuntut tanggung jawab dalam berkomunikasi. Upaya membangun narasi tandingan tidak boleh melibatkan membalas kebencian dengan kebencian atau menyebarkan informasi yang belum terverifikasi. Obermaier et al., (2023) meneliti respons pengguna Muslim terhadap ujaran kebencian Islamofobia melalui studi eksperimental. Hasilnya menunjukkan bahwa ujaran kebencian Islamofobik dapat meningkatkan persepsi ancaman terhadap identitas keagamaan, sementara tanggapan dari anggota kelompok Muslim maupun non-Muslim dapat mendorong niat untuk memberikan tanggapan berbasis fakta. Temuan ini menunjukkan bahwa tanggung jawab untuk mengatasi Islamofobia tidak boleh hanya berada di pundak kelompok yang menjadi sasaran. Masyarakat luas juga dapat berperan melalui klarifikasi, dukungan, dan penolakan terhadap diskriminasi. Dalam diplomasi budaya, siswa pesantren dan komunitas lintas budaya dapat berpartisipasi melalui komunikasi digital yang berbasis bukti, tidak diskriminatif, dan menghormati martabat manusia. Sebuah studi eksperimental yang dilakukan oleh Siegel & Badaan, (2020) mengenai ujaran kebencian berbasis sekte di ruang digital menunjukkan bahwa pesan-pesan yang menekankan identitas keagamaan bersama dan didukung oleh para pemimpin agama dapat secara konsisten mengurangi penyebaran ujaran kebencian dalam konteks yang mereka teliti. Temuan ini menunjukkan bahwa para pemimpin agama dan komunitas keagamaan dapat berperan dalam menetapkan norma-norma komunikasi digital yang menunjukkan rasa hormat yang lebih besar terhadap kelompok-kelompok lain.

Sejalan dengan hal ini, Perserikatan Bangsa-Bangsa, melalui strategi dan rencana aksinya mengenai ujaran kebencian, mengidentifikasi penanganannya sebagai tanggung jawab bersama antara pemerintah, masyarakat sipil, sektor swasta, dan individu United Nation, (2019). Strategi tersebut menekankan pentingnya pendidikan, pengembangan kapasitas bagi warga digital, perlindungan kelompok-kelompok yang terdampak, serta pengembangan narasi tandingan yang tetap menghormati

kebebasan berekspresi dan hak asasi manusia. Perspektif ini memperkuat argumen bahwa penanganan ujaran kebencian tidak dapat diserahkan semata-mata kepada lembaga negara atau kelompok-kelompok yang menjadi sasaran diskriminasi. Masyarakat juga memiliki tanggung jawab untuk menumbuhkan ruang-ruang komunikasi yang menghargai keberagaman dan menolak normalisasi ujaran kebencian.

Berdasarkan sintesis ini, respons diplomasi budaya terhadap disinformasi, Islamofobia, dan dehumanisasi perlu dikembangkan melalui dua jalur yang saling melengkapi. Pertama, interaksi langsung melalui dialog antarbudaya, pertukaran pendidikan, kegiatan sosial, dan kerja sama antarmasyarakat. Kedua, komunikasi digital melalui penyebaran informasi yang dapat diverifikasi, penguatan literasi informasi, dan pengembangan narasi tandingan yang inklusif. Kedua pendekatan ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan kebijakan pemerintah dalam menangani disinformasi dan diskriminasi, melainkan untuk memperluas partisipasi publik dalam menumbuhkan pemahaman dan solidaritas. Para santri dapat berkontribusi dengan menyajikan kehidupan di pesantren dan praktik keagamaan secara seimbang, sementara masyarakat dari berbagai latar belakang dapat membantu menyajikan gambaran Indonesia yang lebih beragam.

Penerapan kedua pendekatan ini harus berlandaskan pada Bhinneka Tunggal Ika dan *tasamuh*. Bhinneka Tunggal Ika berfungsi sebagai prinsip panduan untuk memastikan bahwa komunikasi tidak menghasilkan representasi tunggal tentang Indonesia, sementara *tasamuh* memberikan landasan etis agar respons terhadap perbedaan tetap berakar pada rasa hormat, dialog, dan keadilan. Mengintegrasikan kedua nilai ini sangat penting untuk mencegah diplomasi budaya menjadi kegiatan yang hanya menonjolkan identitas kelompok sendiri. Pertukaran budaya tidak dimaksudkan untuk menegaskan keunggulan tradisi atau keyakinan tertentu, melainkan untuk menciptakan ruang bagi saling pengertian dan penghargaan. Dengan demikian, identitas keagamaan dan kebangsaan dapat disajikan secara bersamaan tanpa menafikan keragaman pihak-pihak yang terlibat.

Berdasarkan hubungan antara nilai-nilai dasar, aktor, mekanisme, dan orientasi hasil tersebut, penelitian ini mengusulkan Kerangka Kerja Diplomasi Budaya Berbasis Masyarakat Bhinneka-*Tasamuh*. Kerangka kerja ini menempatkan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan nasional untuk mengakui keberagaman dan *tasamuh* sebagai landasan etika Islam untuk membangun komunikasi yang menghormati perbedaan. Para santri dan anggota komunitas lintas budaya diposisikan sebagai aktor yang melaksanakan diplomasi melalui tiga mekanisme utama: interaksi langsung, dialog lintas budaya, dan komunikasi digital. Interaksi langsung menciptakan peluang untuk berbagi pengalaman; dialog memperdalam saling pengertian; sedangkan komunikasi digital memperluas cakupan pertukaran dan memungkinkan hubungan tetap terjalin setelah pertemuan berakhir. Ketiga mekanisme ini memerlukan dukungan berupa partisipasi yang setara, tujuan bersama, interaksi yang berkualitas, kerja sama, dukungan kelembagaan, serta keberlanjutan hubungan.

Kerangka kerja ini dirancang untuk membangun kepercayaan antarbudaya, mengurangi prasangka, memperkuat solidaritas, dan menjunjung tinggi martabat manusia. Pemerintah terus berperan sebagai fasilitator melalui kebijakan, dukungan kelembagaan, akses internasional, serta penyediaan ruang untuk kolaborasi. Sementara itu, siswa pesantren dan masyarakat berperan dalam membangun dan memelihara hubungan melalui pengalaman sosial dan komunikasi lintas budaya. Dengan demikian, diplomasi berbasis masyarakat tidak dimaksudkan untuk menggantikan diplomasi pemerintah, melainkan untuk melengkapi diplomasi formal melalui hubungan antarpribadi yang lebih partisipatif dan berakar pada pengalaman masyarakat.

Kekuatan pendekatan berbasis komunitas dalam kerangka ini terletak pada peluang untuk membangun komunikasi dua arah, menyajikan representasi budaya yang berakar pada pengalaman kehidupan nyata, serta mempertahankan hubungan setelah kegiatan diplomatik berakhir. Namun, kekuatan-kekuatan ini bersifat kondisional, bukan universal. Efektivitasnya bergantung pada kualitas interaksi, kesetaraan hubungan, keterlibatan timbal balik, dan keberlanjutan komunikasi. Oleh karena itu, keberhasilan diplomasi budaya tidak dapat diukur semata-mata berdasarkan jumlah kegiatan atau jangkauan publikasi. Penilaian juga harus mempertimbangkan kualitas hubungan yang terjalin, tingkat kepercayaan, keberlanjutan kerja sama, serta perubahan dalam pemahaman terhadap kelompok lain.

Dalam kerangka ini, keadilan global diposisikan sebagai orientasi normatif yang menekankan kesetaraan manusia, penghormatan terhadap identitas yang beragam, serta penolakan terhadap diskriminasi dan dehumanisasi. Diplomasi budaya tidak dapat, dengan sendirinya, menghilangkan segala bentuk ketidakadilan struktural. Namun, diplomasi budaya dapat berkontribusi dengan memupuk hubungan dan komunikasi yang mendukung pengakuan atas martabat manusia. Dengan demikian,

Kerangka Kerja Diplomasi Budaya Berbasis Masyarakat Bhinneka-*Tasamuh* menawarkan pendekatan konseptual yang mengintegrasikan nilai-nilai nasional, etika Islam, partisipasi masyarakat, dan komunikasi lintas budaya sebagai sarana untuk memperkuat pemahaman dan solidaritas global.

KESIMPULAN

Diplomasi budaya dalam menangani disinformasi, Islamofobia, dan dehumanisasi harus melampaui sekadar promosi identitas secara satu arah. Isu-isu ini tidak hanya berkaitan dengan penyebaran informasi yang keliru, tetapi juga dengan pembentukan prasangka, representasi kelompok, dan pengakuan atas martabat manusia. Artikel ini menunjukkan bahwa keterlibatan santri dan masyarakat luas dapat memperluas praktik diplomasi budaya melalui hubungan antarindividu, dialog antarbudaya, dan komunikasi digital yang bertanggung jawab. Ketiga mekanisme ini menciptakan ruang untuk pertukaran pengalaman serta pemahaman yang lebih seimbang mengenai identitas keagamaan dan keragaman budaya Indonesia.

Kontribusi utama artikel ini adalah pengembangan Kerangka Kerja Diplomasi Budaya Berbasis Masyarakat Bhinneka-*Tasamuh*, sebuah kerangka konseptual yang mengintegrasikan Bhinneka Tunggal Ika sebagai landasan identitas nasional untuk mengakui keberagaman, serta *tasamuh* sebagai landasan etis komunikasi yang menghormati perbedaan. Kerangka kerja ini memposisikan santri dan masyarakat sebagai aktor dalam diplomasi budaya melalui tiga mekanisme yang saling melengkapi: interaksi langsung, dialog lintas budaya, dan komunikasi digital. Penerapannya memerlukan partisipasi yang setara, tujuan bersama, interaksi yang berkualitas, dukungan kelembagaan, dan hubungan yang berkelanjutan. Dengan demikian, kontribusi artikel ini tidak hanya terletak pada penempatan santri sebagai aktor dalam diplomasi budaya, tetapi juga pada penguraian hubungan antara nilai-nilai kebangsaan, etika Islam, aktor masyarakat, dan mekanisme komunikasi dalam satu kerangka konseptual.

Diplomasi budaya yang didasarkan pada santri dan masyarakat lokal berpotensi menawarkan keunggulan relasional dibandingkan pendekatan promosi budaya yang hanya mengandalkan komunikasi formal dan satu arah. Potensi ini terletak pada peluang untuk membangun komunikasi dua arah, memberikan pengalaman sosial yang lebih selaras dengan kehidupan masyarakat, serta membina hubungan antarbudaya. Namun, keunggulan-keunggulan ini tidak terjadi secara otomatis maupun berlaku di setiap situasi. Efektivitasnya bergantung pada kesetaraan hubungan, keterbukaan terhadap perbedaan, keterlibatan timbal balik, serta kualitas dan keberlanjutan interaksi. Oleh karena itu, diplomasi berbasis masyarakat tidak dimaksudkan untuk menggantikan peran pemerintah, melainkan untuk melengkapi diplomasi formal melalui partisipasi para aktor sosial yang memiliki pengalaman langsung terhadap kehidupan budaya dan keagamaan masyarakat.

Dalam praktiknya, para santri dapat berperan sebagai duta budaya dengan memperkenalkan kehidupan pesantren, nilai-nilai Islam, dan keragaman Indonesia melalui interaksi dan komunikasi lintas budaya. Peran ini perlu dikembangkan melalui kerja sama dengan komunitas dari berbagai latar belakang agar representasi Indonesia tidak hanya bergantung pada satu identitas atau tradisi saja. Pemerintah terus memainkan peran penting dalam memberikan dukungan kebijakan, akses internasional, dan peluang kerja sama. Sinergi antara pemerintah, pesantren, santri, dan masyarakat luas diperlukan untuk memastikan bahwa diplomasi budaya tidak hanya terbatas pada kegiatan seremonial, tetapi berkembang menjadi hubungan yang saling menghormati dan berkelanjutan.

Karena ini merupakan studi konseptual, kerangka kerja Bhinneka-*Tasamuh* yang diusulkan belum diuji secara empiris. Oleh karena itu, penelitian lebih lanjut perlu mengkaji penerapannya dalam inisiatif diplomasi budaya lintas negara yang melibatkan santri, masyarakat luas, dan mitra internasional. Pengujian tersebut dapat berfokus pada kualitas interaksi, perubahan persepsi, tingkat kepercayaan antarkelompok, keberlanjutan kerja sama, serta kontribusi komunikasi digital dalam menangkal disinformasi dan ujaran kebencian. Penelitian empiris semacam itu sangat penting untuk menilai relevansi, penerapan, dan keterbatasan kerangka kerja yang diusulkan. Pada akhirnya, keberhasilan diplomasi budaya tidak dapat diukur semata-mata dari sejauh mana suatu negara diakui, tetapi juga dari kemampuan para pelakunya dalam membangun hubungan yang didasarkan pada kesetaraan, penghormatan terhadap perbedaan, dan penegakan martabat manusia.

DAFTAR PUSTAKA

Ang, I., Isar, Y. R., & Mar, P. (2015). Cultural diplomacy: Beyond the national interest? *International Journal of Cultural Policy*, *21*(4), 365–381. https://doi.org/10.1080/10286632.2015.1042474

Apandie, C., Rahmelia, S., Risvan, L., & Kodun, N. (2022). Interrelated values between Bhineka Tunggal Ika and religious moderation to strengthen pluralism in Indonesia. *Jurnal Civics: Media Kajian Kewarganegaraan*, *19*(1), 154–164. https://doi.org/10.21831/jc.v19i1.45174

Asyadily, M. H., Mufid, F., & Rosyid, M. (2026). Tasāmuh in Interreligious Coexistence: An Analytical Study of Islamic Ethics and Communicative Action in a Multireligious Society. *Tasfiyah: Jurnal Pemikiran Islam*, *10*(2), 361–401. https://doi.org/10.21111/tasfiyah.v10i2.65

Bhatia, K. V., & Arora, P. (2024). Discursive Toolkits of Anti-Muslim Disinformation on Twitter. *The International Journal of Press/Politics*, *29*(1), 253–272. https://doi.org/10.1177/19401612221084633

Bhinneka Tunggal Ika as Indonesian social ontology: Study of socio-political philosophy. (2026). *Humanities and Social Sciences Communications*, *13*(1), 2090. https://doi.org/10.1057/s41599-026-08112-z

Bruneau, E., Hameiri, B., Moore-Berg, S. L., & Kteily, N. (2021). Intergroup Contact Reduces Dehumanization and Meta-Dehumanization: Cross-Sectional, Longitudinal, and Quasi-Experimental Evidence From 16 Samples in Five Countries. *Personality and Social Psychology Bulletin*, *47*(6), 906–920. https://doi.org/10.1177/0146167220949004

Cowan, G., & Arsenault, A. (2008). Moving from Monologue to Dialogue to Collaboration: The Three Layers of Public Diplomacy. *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*, *616*(1), 10–30. https://doi.org/10.1177/0002716207311863

Cull, N. J. (2008). Public Diplomacy: Taxonomies and Histories. *The ANNALS of the American Academy of Political and Social Science*, *616*(1), 31–54. https://doi.org/10.1177/0002716207311952

Dewi, A., Ansori, F., & Hakim, S. (2023). SANTRI VISIT CHINA: RE-AFFIRMING INDONESIA-CHINA CULTURAL RELATIONS. *Bambuti*, *5*(2), 71–87. https://doi.org/10.53744/bambuti.v5i2.94

Geun Lee, & Kadir Ayhan. (2015). Why Do We Need Non-state Actors in Public Diplomacy?: Theoretical Discussion of Relational, Networked and Collaborative Public Diplomacy. *Journal of International and Area Studies*, *22*(1), 57–77. https://doi.org/10.23071/JIAS.2015.22.1.57

Haslam, N. (2006). Dehumanization: An Integrative Review. *Personality and Social Psychology Review*, *10*(3), 252–264. https://doi.org/10.1207/s15327957pspr1003_4

Imperato, C., Mancini, T., & Amichai-Hamburger, Y. (2024). Solving online conflicts by sensing the other. The role of social presence and closeness in improving the effectiveness of online intergroup contact. *International Journal of Intercultural Relations*, *102*, 102036. https://doi.org/10.1016/j.ijintrel.2024.102036

Jia, W., Fu, L., Dai, Y., & Zuo, Z. (2026). How user comments affect news readers' outgroup prejudice: Vicarious intergroup contact and the moderating role of direct intergroup contact. *Journalism*, *27*(4), 1166–1184. https://doi.org/10.1177/14648849241312596

Lewandowsky, S., & Yesilada, M. (2021). Inoculating against the spread of Islamophobic and radical-Islamist disinformation. *Cognitive Research: Principles and Implications*, *6*(1), 57. https://doi.org/10.1186/s41235-021-00323-z

Maulana, A. (2024). Santri's Multi-Track Diplomacy In Promoting The Islam Nusantara Identity To Global. *Journal of Islamic Civilization*, *5*(2), 177–191. https://doi.org/10.33086/jic.v5i2.5334

Obermaier, M., Schmuck, D., & Saleem, M. (2023). I'll be there for you? Effects of Islamophobic online hate speech and counter speech on Muslim in-group bystanders' intention to intervene. *New Media & Society*, *25*(9), 2339–2358. https://doi.org/10.1177/14614448211017527

Paolini, S., Gibbs, M., Sales, B., Anderson, D., & McIntyre, K. (2024). Negativity bias in intergroup contact: Meta-analytical evidence that bad is stronger than good, especially when people have the opportunity and motivation to opt out of contact. *Psychological Bulletin*, *150*(8), 921–964. https://doi.org/10.1037/bul0000439

Pereira Da Costa, L., Bierwiaczonek, K., & Bianchi, M. (2024). Does Digital Intergroup Contact Reduce Prejudice? A Meta-Analysis. *Cyberpsychology, Behavior, and Social Networking*, *27*(7), 440–451. https://doi.org/10.1089/cyber.2023.0591

Pertiwi, Y. G., Geers, A. L., & Lee, Y.-T. (2020). Rethinking intergroup contact across cultures: Predicting outgroup evaluations using different types of contact, group status, and perceived sociopolitical contexts. *Journal of Pacific Rim Psychology*, *14*, e16. https://doi.org/10.1017/prp.2020.9

Pettigrew, T. F., & Tropp, L. R. (2006). A meta-analytic test of intergroup contact theory. *Journal of Personality and Social Psychology*, *90*(5), 751–783. https://doi.org/10.1037/0022-3514.90.5.751

Siegel, A. A., & Badaan, V. (2020). #No2Sectarianism: Experimental Approaches to Reducing Sectarian Hate Speech Online. *American Political Science Review*, *114*(3), 837–855. https://doi.org/10.1017/S0003055420000283

Trisni, S., Rachman, J. B., Purnama, C., & Department of International Relations, Universitas Padjadjaran, Jl. Bukit Dago Utara No. 25, Bandung, West Java, Indonesia. (2025). Simple Yet Effective: Relational Public Diplomacy by Indonesian Art Centres. *International Journal of Asia Pacific Studies*, *21*(1), 123–150. https://doi.org/10.21315/ijaps2025.21.1.5

United Nation. (2019). *United Nations strategy and plan of action on hate speech* (p. 5). United Nations. https://un.org

Xue Song & Virdika Rizky Utama. (2025). From Indonesia to China: The Evolving Landscape of Santri Diplomacy. *Islam Nusantara: Journal for the Study of Islamic History and Culture*, *6*(1), 1–20. https://doi.org/10.47776/gfpfw650